

Daftar Pustaka

A. Buku

Adjie, Habib, 2009, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Refika Aditama, Bandung.

_____ 2009, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung.

Achmad, Yulianto dan Fajar, Mukti, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Anshori, Abdul Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Fuady, Munir, 2005, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus)*, P.T Citra Aditya Bakti, Bandung.

Handayani, Soewarno, 1983, *Pengantar Studi Administrasi dan Manajemen*, Gunung Agung, Jakarta.

Nico, 2003, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, CDSBL, Yogyakarta.

Notodisoerjo, R. Soegondo, 1993, *Hukum Notariat Indonesia Suatu Penjelasan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Samudera, Teguh, 2004, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Edisi Pertama, PT. Alumni, Bandung

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1983, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.

Sujanto, 1987, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sumardjono, Maria, S. W., 1997, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Tobing, Lumban G, H, S., 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.

B. Tesis

Fitria, Nurdiana, 2012, “Pengawasan Majelis Pengawas Daerah terhadap Profesi Jabatan Notaris di Kota Banjarmasin”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Atmojo, Y, B, D., 2013, “ Pengawasan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Notaris yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik di Kota Surakarta”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Rahayu Endah Hastari, 2014, “ Peran Majelis Pengawas Daerah dalam Pengawasan Tugas Notaris di kabupaten Cilacap”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Solahuddin, 2009, “*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH PERDATA)*”, Visimedia, Jakarta.

Undang-Undang Nomor Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 01. HT. 03. 01 Tahun 2003 Tentang Kenotariatan.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 02. PR.08. 10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Pengawas Notaris.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 01.HT. 03. 01 Tahun 2006 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian Notaris.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris